

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Agar pelaksanaan penelitian berjalan dengan baik, maka pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian sangat penting. Pengertian terhadap objek yang diteliti merupakan salah satu unsur dalam pemahaman, untuk itu peneliti menjelaskan variabel yang terdapat dalam penelitian.

2.1.1 Kemiskinan

2.1.1.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang maupun papan.

Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup. Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan pada kondisi seperti ini, masyarakat dikatakan miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dibandingkan pendapatan rata-rata sehingga tidak bisa mensejahterakan dirinya. Kemiskinan yang sering dijumpai pada negara berkembang tidak hanya sekedar bentuk ketidakmampuan untuk mencukupi hidup, akan tetapi telah meluas

kepada ketidakberdayaan secara sosial maupun politik. Kemiskinan dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang di akibatkan dari dampak negatif pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan individu maupun antar daerah. Adapun pihak yang mendefinisikan kemiskinan secara rinci ialah sebagai berikut:

1. Menurut *World Bank* (dalam Santiko, 2009) ialah kehilangan kesejahteraan (*deprivation of well being*).
2. Menurut Badan Pusat Statistik kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
3. BAPPENAS (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi serba kekurangan yang terjadi bukan karena kemauan individu melainkan karena keadaan yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada pada dirinya.
4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 kemiskinan ialah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
5. Menurut Friedman, kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan kekuasaan sosial berupa aset, sumber keuangan, organisasi sosial politik, jaringan sosial, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan serta informasi.

6. Soerjono Soekanto, kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.

Selain pengertian kemiskinan di atas, terdapat dua teori yang menjelaskan tentang kemiskinan;

1. Teori Neo – Liberal, berakar pada karya politik klasik yang ditulis oleh Thomas Hobbes, John Locke dan John Stuart Mill. Para pendukung Neo-Liberal berargumen bahwa kemiskinan adalah persoalan individual yaitu kelemahan-kelemahan pribadi atau karena pilihan-pilihan individu yang bersangkutan. Teori ini juga pro pendekatan pasar dan beranggapan bahwa kemiskinan akan hilang dengan sendirinya jika kekuatan-kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya. Dalam teori ini, secara langsung strategi penanggulangan kemiskinan harus bersifat sementara dan negara hanya turun tangan apabila keluarga, kelompok-kelompok swadaya atau lembaga-lembaga keagamaan tidak mampu lagi menangani. Pandangan teori ini menghasilkan program Jaminan Pengamanan Sosial (JPS), strategi penanganan kemiskinan yang melembaga merupakan tindakan yang tidak ekonomis dan menyebabkan ketergantungan yang tidak berujung.
2. Teori Demokrasi – Sosial, paradigma ini merupakan kebalikan dari teori Neo-Liberal. Pada teori ini kemiskinan bukan merupakan permasalahan individu melainkan permasalahan struktural, yaitu ketidakadilan dan

ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses-akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber-sumber kemasyarakatan.

Teori ini menyatakan bahwa pasar bebas hanya akan menghasilkan kemiskinan dan eksploitasi. Kapitalisme perlu di lengkapi dengan sistem negara kesejahteraan agar lebih manusiawi dan program pada teori ini harus bersifat melembaga misalnya berupa program jaminan sosial, tunjangan pendapatan atau dana pensiun. Karena pemberian tunjangan atau dana pensiun akan dapat meningkatkan kebebasan untuk menyediakan penghasilan dasar, sehingga orang akan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya. Namun, kelemahan teori ini ialah terlalu bergantung pada pemerintah ataupun negara padahal pembentukan struktur yang tepat harus bekerjasama antara negara dengan penduduk miskin yang tinggal di wilayah tersebut.

Selain itu, dalam kemiskinan ada yang dinamakan lingkaran kemiskinan yaitu suatu rangkaian kekuatan-kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain secara sedemikian rupa sehingga menimbulkan keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi (Sukirno, 1995:217).

2.1.1.2 Macam-Macam Kemiskinan

1. Kemiskinan absolut di definisikan sebagai suatu jumlah penduduk yang hidup di bawah tingkat kemiskinan (Todaro, 1995:218)

2. Kemiskinan relatif ialah kemiskinan yang tidak berhubungan dengan garis kemiskinan dan berasal dari individu itu sendiri.
3. Kemiskinan alamiah merupakan kemiskinan yang di sebabkan oleh kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang masih rendah. Sumber daya manusia yang rendah akan menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja, sedangkan sumber daya alam yang rendah akan mempengaruhi tingkat produksi suatu daerah.
4. Kemiskinan kultural ialah kemiskinan yang di sebabkan oleh sikap individu atau budaya kelompok dalam masyarakat itu sendiri.
5. Kemiskinan struktural ialah kemiskinan yang secara langsung ataupun tidak langsung disebabkan oleh struktur sosial dalam masyarakat. Ketika kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah tidak tepat sasaran maka akan menyebabkan kemiskinan.

Dari macam-macam kemiskinan di atas menggambarkan bahwa kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh individu itu sendiri melainkan terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhinya berupa budaya, pendidikan yang rendah, terbatasnya lapangan kerja, beban hidup keluarga, adanya perasaan malas, keadaan alam dan kondisi sosial yang ada di masyarakat.

2.1.1.3 Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan dapat di sebabkan oleh beberapa faktor di bawah ini, antara lain sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Penduduk, Indonesia sebagai negara berkembang memiliki jumlah penduduk yang besar. Hal ini dibuktikan dengan hasil

sensus penduduk, laju pertumbuhan penduduk meningkat setiap sepuluh tahun. Pertumbuhan penduduk secara cepat membuat Indonesia terpuruk dengan perekonomian yang belum stabil. Jumlah penduduk bekerja tidak sebanding dengan jumlah tanggungan yang menyebabkan angka ketergantungan tinggi dan membuat individu hidup di bawah garis kemiskinan.

2. Distribusi Tidak Merata

Kemiskinan muncul akibat dari rendahnya kepemilikan sumber daya yang mengakibatkan ketimpangan pendapatan, semakin tidak merata distribusi pendapatan menyebabkan semakin luasnya kemiskinan (Todaro, 1995:118) penduduk miskin hanya memiliki sumber daya alam dalam jumlah kecil dan berkualitas rendah.

3. Keterbatasan Modal

Modal merupakan hal utama dalam rumah tangga atau individu untuk menyalurkan keterampilan dengan tujuan memperoleh penghasilan.

4. Rendahnya Produktivitas

Rendahnya produktivitas tenaga kerja akan mengakibatkan individu sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan menjadi penyebab pengangguran meningkat, jika pengangguran meningkat akan berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk miskin.

5. Rendahnya Taraf Pendidikan, Taraf pendidikan rendah akan mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan ruang

lingkup lapangan kerja yang dimiliki menjadi sempit sehingga membatasi diri untuk memanfaatkan peluang.

6. Rendahnya Derajat Kesehatan

Taraf kesehatan yang rendah serta asupan gizi yang buruk menjadi penyebab rendahnya daya tahan fisik dan daya pikir.

7. Kondisi Keterisolasian

Banyak penduduk miskin secara ekonomi kurang mendapat perhatian dari pemerintah karena jarak dan daerah tempat tinggal masyarakat yang sulit dijangkau sehingga menyebabkan keterbelakangan pendidikan, kesehatan dan fasilitas publik lainnya.

2.1.1.4 Dampak Kemsikinan

Adapun dampak yang ditimbulkan dari kemiskinan ialah sebagai berikut:

1. Angka putus sekolah tinggi karena mahalnya biaya pendidikan
2. Kesehatan sulit didapat karena kurangnya pemenuhan kebutuhan gizi
3. Kriminalitas muncul akibat dari sulitnya memenuhi kebutuhan hidup
4. Jumlah orang menganggur bertambah
5. Buruknya generasi penerus.
6. Munculnya Konflik di masyarakat
7. Mobilitas sosial rendah

2.1.1.5 Cara Menanggulangi Kemiskinan

Terdapat beberapa solusi untuk menanggulangi masalah kemiskinan, diantaranya sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang memadai dan gratis
2. Redistribusi lahan dan modal pertanian khusus untuk daerah pedesaan
3. Mendorong perkembangan investasi ke setiap daerah agar perekonomian merata
4. Memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan masyarakat
5. Memeberikan jaminan kesehatan pada masyarakat dengan sistem layanan kesehatan gratis
6. Mendorong agenda pembangunan daerah dan memprioritaskan pemberantasan kemiskinan sebagai skala prioritas utama.

2.1.2 Produktivitas

2.1.2.1 Pengertian Produktivitas

Produktivitas secara teori dapat diartikan sebagai perbandingan *output* (barang dan jasa) dengan *input* yang dapat berupa tanah, tenaga kerja, keahlian dan teknologi. Produktivitas merupakan faktor penting dalam mengembangkan dan mempertahankan suatu lembaga atau perusahaan.

Menurut Sukamto (dalam Ginting, 2017) mengatakan bahwa produktivitas ialah nilai *output* dalam hubungan dengan suatu kesatuan *input* tertentu. Peningkatan produktivitas yang berarti jumlah sumber daya yang di gunakan dengan jumlah barang dan jasa yang di produksi semakin meningkat dan membaik. Sedangkan menurut Moekijat (dalam Ginting, 2017) produktivitas adalah perbandingan jumlah keluaran tertentu dengan jumlah masukan tertentu

dan untuk jangka waktu tertentu. Setiap lembaga dan perusahaan menginvestasikan modal yang dapat berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya modal untuk memproduksi suatu barang maupun jasa dan dengan menginvestasikan sumber daya tersebut secara efektif akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Setiap kegiatan manusia sudah tentu akan menghasilkan keuntungan dari produktivitas yang telah di tingkatkan baik berupa barang maupun jasa.

Sedangkan menurut balai pengembangan produktivitas tenaga kerja, produktivitas dipandang dari dua segi, yaitu:

1. Secara filosofis adalah suatu pandangan bahwa kualitas kerja hari ini harus lebih baik dari kualitas kerja kemarin dan kualitas kerja hari esok harus lebih baik dari hari ini pada umumnya.
2. Secara teknis merupakan rasio antara keluaran dan masukan, atau dengan formula :

$$\text{Produktivitas} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}}$$

Menurut Kuznets, laju kenaikan produktivitas dapat menjelaskan hampir keseluruhan pertumbuhan produk perkapita di negara maju. Pertumbuhan ekonomi moderen dapat terlihat dari meningkatnya laju produk perkapita terutama sebagai akibat adanya perbaikan kualitas *input* yang meningkatkan efisiensi atau produktivitas per unit *input*. Hal ini dapat dilihat dari semakin besarnya masukan sumber tenaga kerja dan modal atau semakin meningkatnya efisiensi. Untuk melihat produktivitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari konsep fungsi produksi yang merupakan konsep sistematis yang menghubungkan *output* dengan berbagai

kombinasi *input* faktor produksi untuk menjelaskan cara penduduk menyediakan kebutuhannya. Jumlah *output* (produk barang dan jasa) dalam perekonomian di suatu wilayah telah di uraikan dengan menghitung besarnya PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

Selanjutnya tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi berperan dalam proses produksi, merupakan populasi orang yang bekerja dalam angkatan kerja pada periode tertentu. Tinggi dan rendahnya produktivitas tenaga kerja sangat ditentukan oleh pendidikan, kesehatan, investasi pemerintah dan swasta. Menurut Manulang (dalam Mulyati, 2004) pembagian produktivitas terdiri atas:

1. Secara Tingkatan

a) Produktivitas Makro (Nasional)

Menunjukkan produktivitas nasional yang dijadikan indikatornya ialah Produk Domestik Bruto sebagai *output* dan tenaga kerja sebagai *input*.

b) Produktivitas Sektoral

Pada produktivitas ini menunjukkan produktivitas untuk setiap sektor dalam perekonomian. Sebagai *output* yang digunakan ialah PDB untuk tingkat nasional dan PDRB untuk tingkat daerah, sedangkan *input* nya berupa tenaga kerja yang bekerja di sektor tersebut. Cara menghitungnya ialah sebagai berikut:

$$\text{Produktivitas Sektoral} = \frac{\text{PDRB Sektoral}}{\text{Tenaga Kerja Sektoral}}$$

c) Produktivitas Mikro

Produktivitas ini menunjukkan produktivitas pada tingkat perusahaan yang menjadi *output* ialah nilai tambah dan *input* nya tenaga kerja.

d) Produktivitas Individu

Produktivitas ini menunjukkan besarnya produktivitas individu, ukuran yang digunakan ialah jumlah barang yang dihasilkan sebagai *output* dan tenaga kerja sebagai *input*.

2. Secara Faktoral

a) Produktivitas Total (*Total Factory Productivity*)

Produktivitas ini menunjukkan besarnya produktivitas dari seluruh faktor yang digunakan untuk menghasilkan *output*. Faktor-faktor tersebut diantaranya tenaga kerja, bahan mentah dan peralatan produksi.

b) Produktivitas Multifaktor (*Multifactor Productivity*)

Produktivitas ini menunjukkan produktivitas dari beberapa faktor yang di gunakan untuk menghasilkan *output* ialah modal dan tenaga kerja.

c) Produktivitas Parsial (*Partial Productivity*)

Produktivitas ini menunjukkan produktivitas dari faktor tertentu yang di gunakan untuk menghasilkan *input* yang digunakan berupa tenaga kerja dan bahan baku.

2.1.3 Tenaga Kerja

2.1.3.1 Pengertian Tenaga Kerja

Adapun beberapa pengertian tenaga kerja ialah sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa tenaga kerja ialah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan

guna menghasilkan suatu barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

2. Menurut Badan Pusat Statistik, tenaga kerja ialah seluruh penduduk dalam usia kerja (15 tahun keatas) yang berpotensi memproduksi barang dan jasa.
3. Simanjuntak (1985) menyatakan bahwa tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga tetapi dalam usia kerja.

Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja atau *labor force* ialah bagian tenaga kerja yang ingin dan yang benar-benar menghasilkan barang dan jasa. Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja, golongan yang menganggur dan sedang mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lain sebagai penerima pendapatan. Besarnya penyediaan atau *supply* tenaga kerja dalam masyarakat adalah jumlah orang yang menawarkan jasanya untuk proses produksi. Di antara individu sebagian sudah aktif dalam kegiatannya yang menghasilkan barang dan/jasa yang dinamakan golongan yang bekerja. Sedangkan, golongan yang siap bekerja dan sedang mencari pekerjaan dinamakan angkatan kerja.

a) Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk berumur 15 tahun keatas yang mampu terlibat dalam proses produksi. Dikatakan bekerja apabila individu tersebut

aktif menghasilkan barang dan/jasa selama satu minggu sebelum melakukan pekerjaan atau selama paling tidak 1 jam dalam seminggu tetapi dengan jangka waktu berturut-turut. Penjumlahan angka-angka angkatan kerja dinamakan sebagai penawaran angkatan kerja (*labour supply*). Sedangkan penduduk yang berstatus sebagai pekerja termasuk kedalam sisi permintaan (*labour demand*).

b) Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat ditampung untuk bekerja pada suatu perusahaan. Kesempatan kerja ini akan menampung semua tenaga kerja apabila lapangan yang tersedia mencukupi dengan banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia. pengertian dari lapangan pekerjaan ialah bidang kegiatan usaha atau instansi dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja (BPS, 2016).

c) Permintaan Tenaga Kerja

Simanjuntak (1985) mengatakan bahwa teori permintaan tenaga kerja ialah teori yang menjelaskan seberapa banyak suatu perusahaan akan mempekerjakan tenaga kerja dengan berbagai tingkat upah pada suatu periode tertentu.

Sumarsono (2009) mengatakan bahwa kesempatan kerja yang dapat diciptakan oleh suatu perekonomian tergantung pada pertumbuhan dan daya serap masing-masing sektor. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya serap tenaga kerja antara lain:

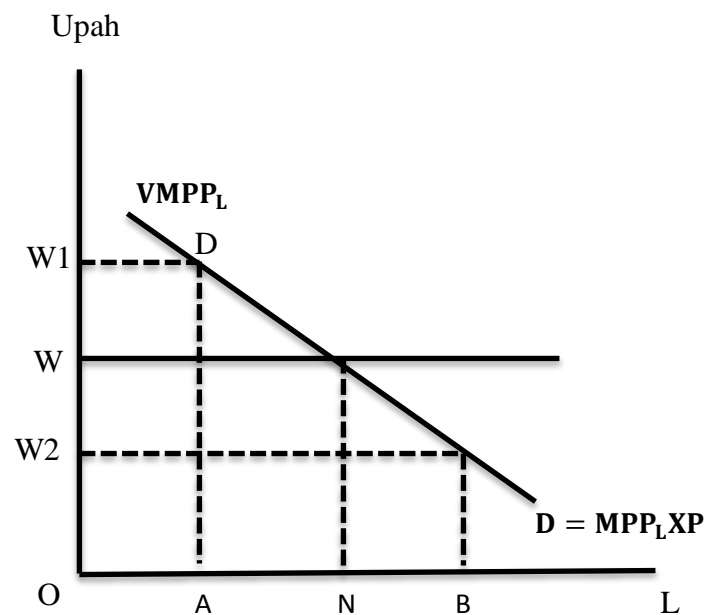
1. Elastisitas terhadap barang yang dihasilkan

2. Proporsi biaya karyawan terhadap seluruh biaya produksi
3. Elastisitas persediaan faktor produksi pelengkap lainnya
4. Substitusi tenaga kerja dengan faktor produksi yang lain.

2.1.3.2 Teori Tenaga Kerja

Teori Neo-Klasik menjelaskan bahwa dalam ekonomi pasar diasumsikan seorang pengusaha tidak dapat mempengaruhi harga, untuk mendapatkan laba pengusaha hanya dapat mengatur jumlah karyawan yang dipekerjakan. Fungsi permintaan suatu perusahaan akan tenaga kerja didasarkan pada:

- 1) Tambahan hasil marjinal yaitu tambahan *output* yang diproduksi pengusaha dengan menambah pekerja, tambahan hasil tersebut dinamakan tambahan hasil marjinal atau *marginal physical product* (MPP_1) dari tenaga kerja
- 2) Permintaan marjinal yaitu jumlah uang yang akan diperoleh pengusaha dengan tambahan hasil marjinal tersebut. Jumlah uang ini dinamakan penerimaan marjinal atau *marginal revenue* (MR). Permintaan marjinal disini merupakan besarnya tambahan hasil marjinal dikalikan dengan harga per unit, sehingga $MR = VMPP_L = MPP_L \cdot P$.
- 3) Biaya marjinal yaitu jumlah biaya yang dikeluarkan pengusaha dengan mempekerjakan tambahan karyawan atau disebut upah karyawan. Apabila tambahan penerimaan marjinal lebih tinggi dari biaya marjinal, maka mempekerjakan individu tersebut akan menambah keuntungan pengusaha sehingga pengusaha akan terus menambah karyawan selama MR marjinal lebih besar dari tingkat upah (w) (Simanjuntak, 1985).



Gambar 2.1 Fungsi Permintaan Tenaga Kerja

Sumber : Simanjuntak (1985)

Garis DD melukiskan nilai hasil marjinal karyawan (*value marginal physical product of labor*) atau $VMPP_L$. Jika jumlah tenaga kerja dipekerjakan sebanyak $OA=100$ orang tenaga kerja, maka hasil nilai orang yang ke-100 dinamakan $VMPP_L$ dan besarnya sama dengan $MPP_L \times P = W1$. Nilai ini lebih besar dari tingkat upah yang berlaku (w). karena itu, penambahan jumlah tenaga kerja baru dapat menaikkan laba perusahaan. Perusahaan dapat terus menambah tenaga kerja guna untuk memaksimalkan keuntungan hingga jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan sebanyak ON .

Pada tingkat ini perusahaan dapat menerima laba maksimum dan nilai $MPP_L \times P$ sama dengan upah yang dibayarkan kepada karyawan. Penambahan tenaga kerja melebihi titik ON , misalnya sebanyak OB akan mengurangi keuntungan perusahaan karena perusahaan harus membayar upah pada tingkat upah yang

berlaku (w) sedangkan hasil nilai marjinal yang diperoleh sebesar W^2 dan lebih kecil daripada W .

2.1.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2.1.4.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto merupakan hasil penjumlahan dari seluruh nilai tambah produksi barang maupun jasa di suatu daerah dalam suatu periode waktu tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut.

Dalam statistik daerah PDRB merupakan perkembangan suatu nilai tambah (*value added*) yang di ciptakan oleh berbagai sektor ekonomi seperti sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Menurut cara produksi pendapatan nasional dan pendapatan daerah dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi yang diciptakan oleh tiap-tiap sektor produktif yang ada dalam perekonomian. Dalam menghitung pendapatan daerah dengan cara produksi, yang dijumlahkan hanya nilai produksi tambahan yang diciptakan. Dengan cara ini dapat dihindarkan berlakunya penghitungan dua kali dan menunjukkan sumbangan yang sebenarnya dari tiap-tiap sektor dalam menciptakan produksi daerah.

2.1.4.2 Manfaat Penghitungan PDRB

Adapun manfaat dalam perhitungan Produk Domestik Regional Bruto ialah sebagai berikut:

- 1) Jika perhitungan PDRB dihubungkan dengan banyak tenaga kerja akan mencerminkan produktivitas tenaga kerja di masing-masing sektor.
- 2) Untuk membandingkan peranan masing-masing sektor di suatu daerah.

- 3) Untuk memantau inflasi.
- 4) Untuk dasar pembuatan proyeksi perkembangan perekonomian di masa yang akan datang.
- 5) Sebagai bahan evaluasi pembangunan dimasa lalu secara keseluruhan.

2.1.4.3 Klasifikasi PDRB Sektor Ekonomi

United Nations memberikan rekomendasi bahwa secara makro perekonomian di klasifikasikan ke dalam 9 sektor yaitu:

- 1) Pertanian
- 2) Pertambangan dan penggalian
- 3) Industri pengolahan
- 4) Listrik, Gas dan Air bersih
- 5) Konstruksi/Bangunan
- 6) Perdagangan, Hotel dan Restoran
- 7) Pengangkutan dan Komunikasi
- 8) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
- 9) Jasa-jasa.

Adapun klasifikasi sektor ekonomi lainnya (Sukirno, 1995:18) dibedakan menjadi beberapa sektor, diantaranya:

- 1) Pertanian, kehutanan dan perikanan
- 2) Pertambangan
- 3) Industri pengolahan (*manufacturing*)
- 4) Perusahaan Listrik, Air dan Gas
- 5) Industri bangunan

- 6) Pengangkutan dan pergudangan
- 7) Perdagangan
- 8) Bank, badan keuangan dan *real estate*
- 9) Pemilikan rumah
- 10) Administrasi negara dan pertahanan
- 11) Jasa-jasa lainnya.

Sedangkan klasifikasi sektor ekonomi dalam tiga sektor ialah:

- 1) Sektor Primer ; Tanaman pangan dan perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan serta pertambangan dan penggalian.
- 2) Sektor Sekunder ; industri makanan, industri tekstil, industri kulit dan alas kaki, industri kayu, industri kertas dan percetakan, industri kimia dan farmasi, industri karet dan plastik, industri mineral non logam, industri logam mesin dan elektronika, industri instrument optik dan jam, industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain, serta industri lainnya.
- 3) Sektor Tersier ; Listrik gas dan air, konstruksi, perdagangan dan reparasi, hotel dan restoran, transportasi gudang dan komunikasi, perumahan kawasan industri dan perkebunan, jasa lainnya.

2.1.4.4 Cara Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto

1. Perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan nilai tambah bruto dengan cara mengurangi nilai *output* yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dari masing-masing nilai produksi bruto dari setiap sektor ekonomi pada barang dan jasa yang

diperoleh unit produksi sebagai *input* antara, *value added* sama dengan balas jasa faktor produksi dalam keikutsertaannya pada proses produksi.

a) Pendekatan Pendapatan

Pada pendekatan ini merupakan nilai tambah dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi berupa upah, gaji dan *surplus* usaha, serta penyusutan dan pajak tak langsung neto. Akan tetapi pada sektor pemerintahan yang sifatnya tidak mencari keuntungan, *surplus* usaha tidak diperhitungkan.

b) Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan ini digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat. Perhitungan PDRB pada pendekatan ini dengan cara menjumlahkan seluruh komponen pembentukan modal, ekspor, nilai barang dan jasa yang pada akhirnya akan terbentuk PDRB atas dasar harga pasar.

c) Metode Alokasi

Metode ini menggunakan data yang telah dialokasikan dari sumber yang tingkatannya lebih tinggi seperti untuk menghitung nilai tambah dari satu unit produksi daerah kabupaten/kota yang menjadi acuannya data provinsi.

2. Perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan, Menurut BPS Provinsi Jawa Barat (2011), ada empat cara yang digunakan untuk menghitung Nilai Tambah Bruto atas dasar harga konstan yaitu:

a) Revaluasi, metode ini dilakukan dengan cara menilai produksi dan biaya antara masing-masing tahun dengan harga pada tahun dasar.

Nilai Tambah Bruto atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih antara *output* dengan *intermediate input*.

b) Ekstrapolasi

Nilai tambah atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar yang akan dihitung dengan indeks produksi. Indeks produksi yang digunakan sebagai eksplorator dapat merupakan indeks dari masing-masing produksi yang dihasilkan ataupun indeks dari berbagai indikator produksi misalnya tenaga kerja, jumlah perusahaan dan lainnya yang dianggap cocok dengan jenis kegiatan yang dihitung

c) Deflasi

Nilai tambah atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku pada masing-masing tahun dengan indeks harga. Indeks harga yang digunakan biasanya Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB).

d) Deflasi Berganda

Komponen yang di deflasi adalah *output* dan biaya antara. Sedangkan nilai tambah diperoleh dari selisih *output* dan biaya antara hasil deflasi tersebut. Selain itu, untuk menghitung PDRB dapat digunakan melalui salah satu cara perhitungan pendapatan nasional yaitu dengan pendekatan pengeluaran. Adapun rumus persamaanya ialah sebagai berikut:

$$\mathbf{PDRB = C + I + G + (X - M)}$$

Keterangan :

C : Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

I : pembentukan Modal

G : Pengeluaran Pemerintah

(X-M) : Selisih Nilai Ekspor dan Impor.

2.1.5 Tenaga Kerja Sektor Primer

Tenaga kerja sektor primer ialah individu yang bekerja pada sektor ekonomi primer. Adapun yang di maksud dengan sektor primer merupakan sektor ekonomi yang dihasilkan langsung dari sumber daya alam dimana hasil *output* nya berupa bahan mentah yang masih harus diolah. Sektor primer di dalamnya terdapat beberapa sektor yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan serta pertambangan dan penggalian. Sektor primer ini memiliki peranan yang strategis karena mampu menentukan keberlangsungan sektor lain.

2.1.6 Tenaga Kerja Sektor Sekunder

Tenaga kerja sektor sekunder merupakan individu yang bekerja pada sektor ekonomi sekunder. Sektor sekunder seringkali dikaitkan dengan sektor industri pengolahan (*manufacturing*), kegiatan yang dilakukan pada sektor ini ialah mengolah barang mentah menjadi barang yang siap untuk dikonsumsi.

Kegiatan yang dilakukan oleh sektor ini untuk meningkatkan nilai tambah dari suatu barang *input*. Peranan sektor sekunder dalam perekonomian juga cukup tinggi karena mampu menyerap tenaga kerja banyak dan upah yang ditawarkan pada sektor sekunder biasanya lebih tinggi dibanding upah pada sektor primer.

Namun penyerapan tenaga kerja di sektor sekunder tidak terlalu besar karena sudah banyak yang diganti oleh tenaga mesin sebagai dampak dari besarnya investasi modal.

2.1.7 Tenaga Kerja Sektor Tersier

Tenaga kerja sektor tersier ialah individu yang bekerja pada sektor tersier. Sektor yang mendominasi pada tersier ini ialah perdagangan dan jasa-jasa. Salah satu pendorong meningkatnya produktivitas sektor ini ialah inovasi pada sektor ini atau gagasan-gagasan baru untuk pemenuhan kepuasan manusia. Akan tetapi pada negara berkembang seperti Indonesia inovasi sulit dikembangkan karena faktor sumber daya manusia.

Sektor ekonomi yang tergabung dalam sektor tersier ini diantaranya ialah sektor perdagangan, hotel dan restoran, bangunan dan konstruksi, pengangkutan dan komunikasi, jasa perusahaan dan keuangan serta jasa-jasa lainnya. Sektor primer ini merupakan sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja terbesar di provinsi Jawa Barat dibandingkan dengan sektor primer dan sektor sekunder.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan penelitian yang akan dilakukan penulis mengenai analisis kemiskinan ditinjau dari sudut produktivitas tenaga kerja sektor ekonomi di provinsi Jawa Barat tahun 2003-2017.

Adapun Penelitian terdahulu yang menjadi acuan untuk penelitian ini ialah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Analisis Pengaruh Produktivitas Sektoral Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara Periode 2005-2014 (Andre Pratama Ginting,2017)	Menggunakan variabel terikat kemiskinan dan variabel bebas produktivitas sektoral	Menggunakan variabel bebas laju PDRB	PDRB berpengaruh (-) dan signifikan. Produktivitas sektor pertanian berpengaruh (-) dan signifikan. Produktivitas sektor industri berpengaruh (-) dan tidak signifikan
2	Peranan Pendidikan dan Produktivitas Sektor Pertanian Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah (Rully Sutansyah Effendy,2017)	Menggunakan variabel terikat kemiskinan dan variabel bebas produktivitas sektor ekonomi.	Menggunakan variabel bebas pendidikan	Tingkat pendidikan berpengaruh (-) dan signifikan. Produktivitas sektor pertanian berpengaruh (-) dan signifikan
3	Pengaruh Output Sektor Pertanian, Industri Pengolahan dan Perdagangan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2013 (Dian Candra Sakti, 2016)	menggunakan variabel terikat kemiskinan	Menggunakan variabel bebas output sektor ekonomi	Output sektor pertanian berpengaruh (-) dan signifikan. Output sektor industri berpengaruh (-) dan signifikan. Output sektor perdagangan berpengaruh (-) dan

				signifikan.
4	Analisis Korelasi Sektor Pertanian Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Steva Olviyanti Ponto, Andreson Kumenaung, Patrick Wauran. 2015)	Menggunakan variabel terikat kemiskinan	Tidak menggunakan ukuran produktivitas	sektor pertanian berpengaruh (-) dan signifikan.
5	Analisis Eksistensi Sektor Pertanian Terhadap Pengurangan Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan. (Iwan Hermawan, 2012)	Menggunakan variabel terikat kemiskinan	menggunakan GDP sebagai variabel bebas.	Sektor ekonomi berpengaruh (-) dan tidak signifikan.
6	Analisis Produktivitas Sektoral terhadap Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2008-2012. (Januar Hardi Halim, 2014)	Menggunakan variabel terikat kemiskinan	Menggunakan variabel bebas produktivitas sektoral	Pertumbuhan ekonomi dan produktivitas industri berpengaruh signifikan. Sedangkan variabel sektor pertanian tidak memiliki pengaruh yang signifikan.
7	Pengeluaran Pemerintah Daerah, Produktivitas Pertanian dan Kemiskinan di Indonesia (Akbar Suwardi: Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol.12 Juli 2011)	Menggunakan variabel terikat kemiskinan	Menggunakan variabel bebas produktivitas pertanian	Pengeluaran pemerintah dan produktivitas pertanian berpengaruh signifikan.
8	Pengaruh PDRB Perkapita, Pendidikan dan Produktivitas Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. (Ketut Sutrisna: Jurnal EP Unud Vol.3 No.10: 431-439 Oktober 2014)	Menggunakan variabel terikat kemiskinan	Menggunakan variabel bebas produktivitas tenaga kerja	Produktivitas tenaga kerja terhadap kemiskinan tidak berpengaruh signifikan.

9	Analisis Pengaruh Sektor Pertanian dan Sektor Industri Pengolahan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah (Agus Setyawan, 2015)	Menggunakan variabel terikat kemiskinan	Menggunakan variabel bebas sektor pertanian dan sektor industri	Sektor Pertanian berpengaruh (-) dan tidak signifikan
10	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat (Martuti Nurhayati, 2007)	Menggunakan variabel terikat kemiskinan	Menggunakan regresi linier berganda dalam penelitian	Pendapatan, pendidikan dan jumlah pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan

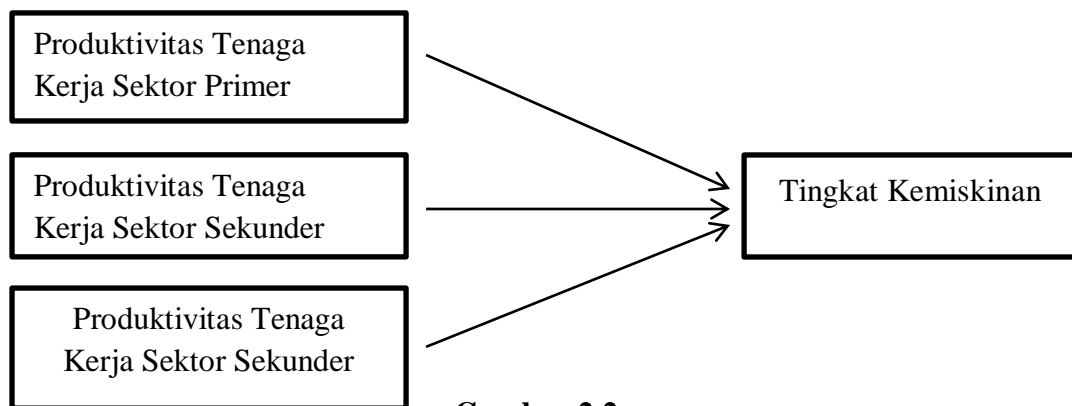
2.3 Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah penulis dalam penelitian, dimunculkan kerangka berpikir untuk menjelaskan produktivitas tenaga kerja sektor primer, produktivitas tenaga kerja sektor sekunder dan produktivitas tenaga kerja sektor tersier terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Barat.

2.3.1 Hubungan Produktivitas dengan Kemiskinan

Produktivitas tenaga kerja sektor primer, produktivitas tenaga kerja sektor sekunder dan produktivitas tenaga kerja sektor tersier berhubungan erat dengan kemiskinan. Meningkatnya *output* pada ketiga sektor ekonomi ini akan meningkatkan *output* secara keseluruhan yang digambarkan dengan semakin tingginya Produk Domestik Regional Bruto suatu daerah. Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi mengindikasikan bahwa semakin banyaknya orang yang bekerja. Artinya, penduduk yang masih menganggur akan mendapatkan pekerjaan dan yang sudah bekerja akan mempunyai peluang untuk mendapatkan upah/gaji yang lebih tinggi dan pada

akhirnya penduduk miskin berpendapatan rendah akan berkurang sehingga persentase jumlah penduduk miskin berkurang. Oleh sebab itu, hubungan antara produktivitas tenaga kerja sektor ekonomi primer, produktivitas tenaga kerja sektor ekonomi sekunder dan produktivitas tenaga kerja sektor ekonomi tersier dengan kemiskinan ialah negatif.



Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah masalah sementara dari penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis merupakan suatu penjelasan dari beberapa masalah yang sedang di pelajari yang dapat dibenarkan atau dapat di tangguhkan.

Dari uraian permasalahan yang ada maka dapat dikemukakan suatu hipotesis yang akan diuji kebenarannya dalam penelitian ini yaitu:

1. Diduga produktivitas tenaga kerja sektor primer, produktivitas tenaga kerja sektor sekunder dan produktivitas tenaga kerja sektor tersier secara parsial berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Barat tahun 2003-2017.

2. Diduga produktivitas tenaga kerja sektor primer, produktivitas tenaga kerja sektor sekunder dan produktivitas tenaga kerja sektor tersier secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Barat tahun 2003-2017.